AKUNTANSIKU
Volume 5 No.3, 2026

PUBLIC SECTOR SUSTAINABILITY REPORTING: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF THE RELEASE OF IPSASB SRS 1ST EDITION

PELAPORAN BERKELANJUTAN SEKTOR PUBLIK: PELUANG DAN TANTANGAN ATAS TERBITNYA IPSASB SRS ED-1

Kukuh Prasetyo [1)]; Syafrina Maulidiyah [2)]; Risa Rahajeng [3)]

kukuh.prasetyo20@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Abstract
Sustainability reporting in the public sector is a growing strategic necessity amid increasing demands for transparency, accountability, and climate policy integration into national governance systems. This study aims to analyze the opportunities and challenges of implementing the Sustainability Reporting Standard Exposure Draft 1 (SRS ED-1) issued by IPSASB as a global framework for public sector sustainability disclosures. The research was conducted using the PRISMA flow diagram of 180 international and national scholarly sources, narrowed down to 24 relevant articles. Findings reveal that SRS ED-1 presents opportunities to enhance governance quality, fiscal sustainability, and access to green financing. Nevertheless, structural challenges such as limited human resources, low technological readiness, data fragmentation, and institutional resistance remain significant barriers. Therefore, concrete measures such as establishing national regulation, capacity-building programs, digital system strengthening, and cross-ministerial pilot projects are necessary to support its gradual implementation.
Keywords*: Climate change; IPSASB; Public sector; Sustainability reporting*

Abstrak
Pelaporan keberlanjutan sektor publik menjadi urgensi strategis di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi kebijakan iklim ke dalam sistem tata kelola negara. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan penerapan Sustainability Reporting Standard Exposure Draft 1 (SRS ED-1) yang disusun oleh IPSASB sebagai standar global pelaporan keberlanjutan sektor publik. Penelitian dilakukan menggunakan alur diagram PRISMA dari 180 publikasi ilmiah internasional dan nasional, yang disaring menjadi 24 artikel terpilih. Hasil menunjukkan bahwa SRS ED-1 membuka peluang peningkatan kualitas tata kelola, efisiensi fiskal, serta akses pendanaan berkelanjutan. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan SDM, kesiapan teknologi, fragmentasi data, dan resistensi kelembagaan masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti penyusunan regulasi nasional, pelatihan teknis, penguatan sistem informasi, dan *pilot project* lintas K/L untuk mendukung implementasi standar ini secara bertahap.
Keywords: laporan keberlanjutan, sektor publik, IPSASB, perubahan iklim
JEL Classification: H83, M48, Q56

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dapat membawa konsekuensi serius bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menghadapi hal tersebut, pemerintah perlu mengambil peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendorong aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Ritchie, 2024). Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang tercermin dalam integrasi target penurunan emisi gas rumah kaca ke dalam RPJMN 2015–2019, serta pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020–2024. Pemerintah juga telah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) kepada UNFCCC, dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% dari proyeksi emisi *Business as Usual (BAU)* melalui sumber daya domestik, dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (Puspasari, 2022). Dalam Forum G20 Tahun 2022, Indonesia menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi biru, hijau, dan sirkular, sekaligus menunjukkan kontribusinya dalam mendorong ekonomi berkelanjutan serta memfasilitasi berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik (Limanseto, 2022). Sejak tahun 2016 hingga tahun 2021, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran perubahan iklim melalui kebijakan *climate change budget tagging* terakumulasi sebesar Rp502 triliun, dengan rincian sebagaimana terlihat pada Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Anggaran Kebijakan *Climate Change Budget Tagging* pada Tahun 2016-2022 Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2023)



Pemerintah juga berusaha mengoptimalkan skema *blended financing* dengan melibatkan BUMN dan sektor swasta, domestik maupun internasional, untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan perubahan iklim (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Namun, tanpa sistem pelaporan keberlanjutan, capaian target ini sulit untuk dipantau dan diverifikasi secara transparan. Oleh karena itu, muncul urgensi adanya pelaporan keberlanjutan yang merupakan alat transparansi perusahaan untuk mengomunikasikan

dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menilai risiko, peluang, dan dampak operasionalnya secara menyeluruh (Limarwati et al., 2024).

Laporan keberlanjutan merupakan proses pengungkapan informasi oleh perusahaan mengenai kinerja dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (IPSASB, 2025). Laporan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan terkait pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, serta relevansi dan materialitas isu-isu keberlanjutan terhadap keberlanjutan perusahaan secara umum maupun terhadap kinerja keuangannya (Jørgensen et al., 2022). Dalam implementasinya, sektor swasta Indonesia telah menjadi pionir dalam mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan melaui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipicu oleh konvergensi tekanan dari investor yang mengutamakan portofolio berkelanjutan, regulator yang memberlakukan standar pelaporan wajib, dan konsumen yang menuntut transparansi jejak ekologis (Sitorus & Febrianto, 2024). Sementara itu, pada sektor pemerintah, International Sustainability Standards Board (ISSB) telah merilis IFRS S1 yang berfokus pada persyaratan umum pengungkapan informasi keberlanjutan terkait keuangan dan IFRS S2 yang berfokus pada risiko dan peluang iklim (IFRS, 2024). Di sisi lain, Global Reporting Initiative (GRI) Standards juga menyediakan kerangka pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (GRI, 2023). Praktik pelaporan keberlanjutan selanjutnya dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi reputasi perusahaan, namun juga menjadi alat strategis dalam pengelolaan risiko dan identifikasi peluang bisnis yang berkelanjutan (Al-Shaer et al., 2022).

Dari perspektif sektor publik, laporan keberlanjutan berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap dampak jangka panjang kebijakan yang dijalankan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan membuka peluang pendanaan strategis, termasuk dari pasar modal (IPSASB, 2024). Namun, penerapan pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia menghadapi kompleksitas yang unik, mengingat posisi pemerintah sebagai entitas ekonomi terbesar dengan tanggung jawab ganda sebagai regulator, penyedia layanan publik, dan pengelola fiskal. Meskipun pelaporan keberlanjutan telah menjadi praktik global untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, implementasinya di Indonesia masih terkendala oleh kesenjangan struktural, kompleksitas pengukuran dan pelaporan berkelanjutan, kapasitas kelembagaan, dan inkonsistensi kebijakan (Rahmasari & Bandiyono, 2025).

Pada tahun 2024, International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) telah merilis draf Standar Pelaporan Keberlanjutan untuk

sektor publik, yang dikenal sebagai IPSASB Sustainability Reporting Standard (IPSASB SRS). Draf ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengungkapan informasi keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim, dalam konteks akuntabilitas dan transparansi sektor publik (IPSASB, 2024). Inisiatif ini mencerminkan langkah awal penting dalam mendorong harmonisasi pelaporan keberlanjutan sektor publik di tingkat global, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi internasional. Di sisi lain, keterlambatan adopsi standar global oleh sektor publik di Indonesia tercermin dalam transisi menuju basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan, yang baru berhasil diterapkan pada tahun 2015 (Kumaradewi & Halim, 2019). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi risiko serupa dalam penerapan pelaporan keberlanjutan di lingkungan sektor publik.

Entitas sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian SDGs serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan (Kaur & Lodhia, 2019; Wachira & Mathuva, 2022). Seiring dengan peran tersebut, publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari sektor publik, terutama dalam menyikapi isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Adopsi standar pada SRS ED-1 dapat meningkatkan konsistensi, komparabilitas, dan kualitas laporan keberlanjutan (IPSASB, 2024) tetapi terdapat tantangan, seperti kurangnya standar yang seragam, ketidakpastian dalam definisi dan pengukuran, rendahnya kebijakan dan kepatuhan, minimnya verifikasi eksternal, serta keterbatasan fleksibilitas standar (Munoz et al., 2017). Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Domingues et al. (2017), Kindratska (2024), Galip & Gönen (2025), dan Özçelik et al. (2025) telah mengkaji praktik, peluang, dan tantangan penerapan pelaporan keberlajutan di sektor publik dari beberapa standar pelaporan berkelanjutan yang ada, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis hal tersebut setelah dikeluarkannya IPSASB SRS ED-1. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemerintah dalam membuat laporan keberlanjutan dan peluang serta tantangan pelaporan berkelanjutan di Indonesia setelah terbitnya Draft IPSAS SRS.

KAJIAN PUSTAKA

Enviromental, Social, Governance (ESG) dan Pelaporan Berkelanjutan

Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan organisasi melalui tiga pilar utama: lingkungan, sosial, dan tata kelola (BEI, 2025). Dalam mewujudkan ketiga hal tersebut perlu adanya kerangka regulasi yang menetapkan isu-isu apa saja yang perlu menjadi fokus pengelolaan, serta bagaimana lembaga regulatif dan pemerintah dapat memanfaatkan pendekatan

ESG sebagai alat untuk menyelaraskan kebijakan dan merumuskan solusi yang terintegrasi terhadap beragam tantangan yang ada (Zhao, 2024). Menurut Zhang (2023), aspek lingkungan mencakup penilaian terhadap dampak operasional perusahaan terhadap ekosistem, termasuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya, konsumsi energi, pengelolaan limbah, serta kontrol terhadap emisi. Seiring meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan, penerapan strategi berorientasi lingkungan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko ekologis dan memperkuat reputasi serta citra perusahaan. Sementara itu, dimensi sosial menitikberatkan pada interaksi perusahaan dengan masyarakat, meliputi perlindungan hak karyawan, pemberian kesejahteraan yang layak, penerapan prinsip keberagaman dan inklusi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengelolaan etis dalam rantai pasok, serta dukungan terhadap pembangunan sosial di lingkungan sekitar.

Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) (2016), pelaporan berkelanjutan adalah praktik organisasi dalam mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusinya terhadap keberlanjutan. Pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai instrumen strategis yang memungkinkan perusahaan dan organisasi mengevaluasi serta menyampaikan capaian kinerja mereka dalam aspek keberlanjutan. Urgensi pelaporan ini muncul dari tuntutan akan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional (Rusu et al., 2024).

Pelaporan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang saling terintegrasi, dengan fokus pada emisi karbon, pemberdayaan sosial, dan struktur tata kelola yang transparan. Cakupan ini mengacu pada prinsip materialitas dan diwujudkan melalui berbagai standar, seperti GRI (khususnya GRI 305 dan GRI 207), SASB yang berbasis industri, serta IFRS S1-S2 yang dikeluarkan ISSB dengan kerangka TCFD. Di Indonesia, implementasi pelaporan berkelanjutan diperkuat oleh regulasi OJK No.51/2017 dan Pedoman Pelaporan Berkelanjutan 2022 dari Kementerian BUMN yang mengintegrasikan GRI dan SASB. Pada sektor publik, IPSASB merancang Sustainability Reporting Standards (SRS) yang mencakup pelaporan aset alam, dampak kebijakan fiskal terhadap iklim, dan akuntabilitas sosial. Lebih lanjut, IPSASB telah mengeluarkan IPSASB SRS Exposure Draft 1, Climate-related Disclosures pada 31 Oktober 2024 sebagai rancangan awal standar pelaporan keberlanjutan sektor publik bagi negara-negara di dunia.

Pelaporan Berkelanjutan Sektor Publik

Dalam sektor publik, meskipun substansi pelaporan keuangan dan anggaran dari entitas telah cukup mapan, tetapi masih terdapat kebutuhan mendesak untuk mengelompokkan dan menyusun informasi yang relevan ke dalam laporan non-keuangan (Kindratska, 2024). Format yang paling umum digunakan adalah laporan keberlanjutan, yang bertujuan menyajikan informasi yang lengkap dan objektif mengenai dampak kegiatan organisasi sektor publik terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat (Handoko & Lindawati, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, ESG *Reporting* juga semakin berkembang, di mana pelaporannya menekankan aspek keberlanjutan dari sudut pandang investasi dan tata kelola. Kedua jenis laporan ini mengandalkan prinsip yang sama dalam membentuk basis informasi, yaitu: keandalan, transparansi, dan pengukuran capaian pembangunan berkelanjutan (Kindratska, 2024).

Pelaporan keberlanjutan di sektor publik semakin mendapat perhatian, meskipun masih tertinggal dibandingkan sektor swasta dalam hal kematangan dan tingkat adopsi (Özçelik et al., 2025). Lembaga sektor publik kini mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pelaporan dan diseminasi informasi terkait praktik keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi institusional (Alcaraz-Quiles et al., 2014). Sejumlah pandangan menekankan bahwa pelibatan sektor publik dalam pelaporan keberlanjutan menjadi krusial, tidak semata-mata karena dominasi peran mereka dalam struktur ekonomi nasional, tetapi juga karena karakteristik fungsional mereka yang secara historis melekat pada berbagai aktivitas dan kebijakan yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (Adams et al., 2014).

Implementasi pelaporan keberlanjutan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara kepatuhan regulasi, tekanan institusional, dan kesiapan infrastruktur (Rahmasari & Bandiyono, 2025). Kualitas laporan keberlanjutan perusahaan publik di Indonesia berada pada kategori sedang, sedangkan sektor publik masih dihadapkan pada hambatan struktural seperti ketiadaan standar yang baku serta resistensi internal organisasi (Hidayati, 2023). Meskipun kerangka Global Reporting Initiative (GRI) telah menjadi rujukan utama, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan kapasitas institusional dan pemahaman yang belum merata (Saraswati & Alam, 2024). Regulasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 telah mendorong peningkatan jumlah laporan keberlanjutan di sektor privat, namun belum diimbangi dengan perbaikan kualitas pelaporan secara substansial. Dalam konteks sektor publik, pelaporan keberlanjutan mencakup pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik dan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas, yang menjadi pembeda utama dari laporan sektor swasta yang lebih berfokus pada nilai pemegang saham (POJK 51/2017).

IPSASB SRS ED-1

Standar pelaporan keberlanjutan merupakan kerangka penting yang membimbing perusahaan dalam mengungkapkan kinerja mereka di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) (IPSASB, 2025). Standar-standar ini telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, dengan munculnya berbagai kerangka dan regulasi untuk menjawab meningkatnya kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas (Rusu et al., 2024). Penyusunan laporan keberlanjutan yang efektif sangat bergantung pada standar internasional, antara lain GRI (Global Reporting Initiative), (ESRS) European Sustainability Reporting Standards, SASB (Sustainability Accounting Standards Board), ISSB (International Sustainability Standards Board), dan IPSASB (International Public Sector Accounting Standar Board).

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) merupakan organisasi utama yang bertanggung jawab dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi untuk sektor publik, yang dikenal sebagai International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) (IPSASB, 2025). Dalam kerangka laporan keberlanjutan, IPSASB mengeluarkan IPSASB SRS ED-1 yang merupakan draf standar pelaporan keberlanjutan untuk entitas sektor publik. Standar ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan pelaporan yang transparan dan terintegrasi terkait risiko serta peluang iklim terhadap operasional lembaga publik, sekaligus mengukur dampak dari kebijakan publik yang ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam proses penyusunannya, IPSASB mengadopsi kerangka dari sektor swasta (TCFD, IFRS, GRI) serta memperkuat fondasi teoretisnya melalui IPSASB Conceptual Framework. Hal ini bertujuan agar laporan sektor publik dapat sejajar dengan praktik keberlanjutan yang berlaku umum dan tetap relevan dengan mandat pelayanan publik (IPSASB, 2025).

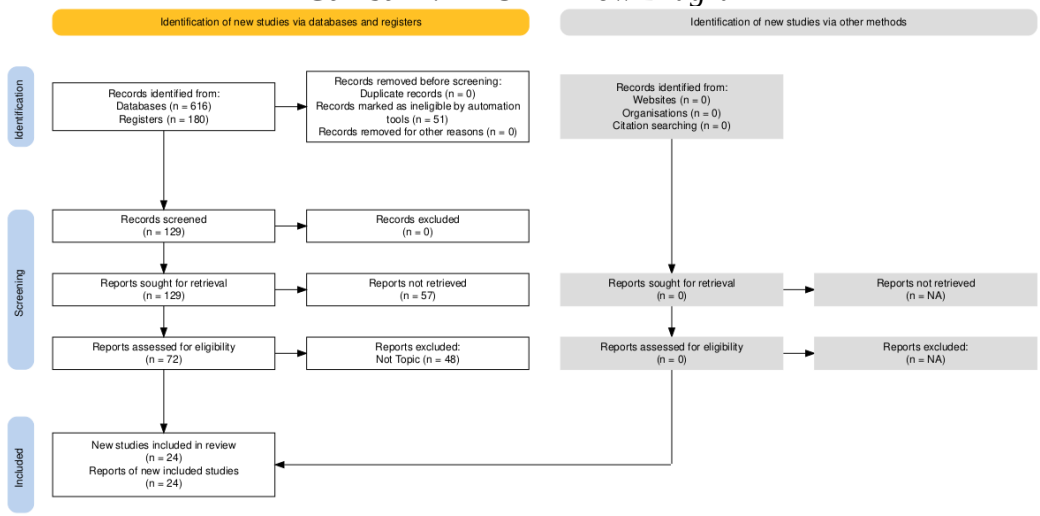
SRS ED 1 mengusung empat pilar utama pelaporan, yaitu tata kelola (*governance*), strategi (*strategy*), manajemen risiko (*risk management*), serta metrik dan target (*metrics and targets*), yang semuanya dirancang untuk memberikan panduan komprehensif dan sistematis. Selain itu, ditekankan pula prinsip penyajian wajar, konektivitas informasi, dan materialitas, agar laporan dapat menggambarkan secara utuh dan relevan kinerja serta tanggung jawab sektor publik dalam menghadapi krisis iklim. Melalui standar ini, IPSASB tidak hanya ingin meningkatkan akuntabilitas sektor publik, tetapi juga memperkuat kontribusi lembaga pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim global (IPSASB, 2025).

METODE

Kajian ini disusun secara sistematis dengan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang

dinilai sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian sesuai dengan Gambar 1 di bawah ini. Berdasarkan Haddaway et al. (2022), proses penelitian menggunakan metode PRISMA dibagi menjadi beberapa langkah. Pertama, proses identifikasi yakni mencari catatan dan duplikat dari basis data yang relevan terkait pelaporan berkelanjutan sektor publik. Kedua, proses penyaringan untuk menyaring studi berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi studi yang tidak relevan dengan topik penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan uji kelayakan untuk menyaring studi yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sesuai topik penelitian.
Ketiga, proses inklusi yakni mengikutsertakan studi yang telah memenuhi semua kriteria dan melaporkan hasil akhir.

Gambar 1. *PRISMA Flow Diagram*



Sumber: Haddaway et al. (2022), diolah

Pada proses identifikasi, kriteria seleksi mencakup artikel jurnal, prosiding konferensi, dan bab buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan bahasa lain selama periode tahun terakhir 2013–2025 menggunakan database Scopus, DOAJ, dan Springer. Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi: "sustainability" OR "sustainable" OR "eco-friendly" OR "green") AND ("report" OR "reporting" OR "disclosure" OR "documentation") AND ("public sector" OR "government" OR "public administration" OR "state") AND ("accountability" OR "transparency" OR "performance" OR "evaluation") AND ("policy" OR "strategy" OR "framework" OR "guideline"). Dari proses ini diperoleh total 180 artikel.

Pada proses penyaringan, dilakukan penyaringan abstrak untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan dan memastikan substansi isi yang sesuai. Hasil tahap ini menghasilkan 72 artikel yang dikategorikan sebagai relevan atau mungkin relevan. Evaluasi kemudian dilanjutkan dengan

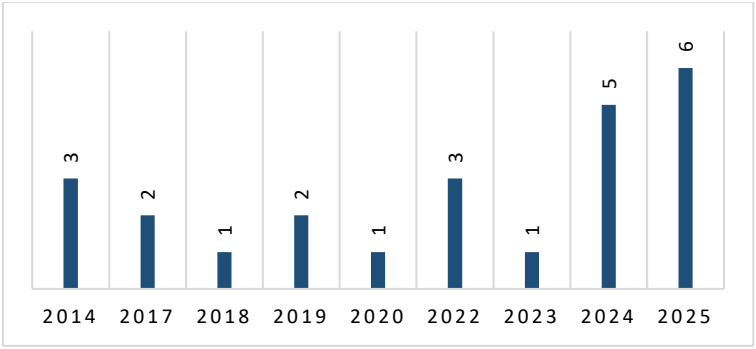
membaca secara menyeluruh 72 artikel tersebut guna memastikan keterkaitannya dengan topik. Setelah proses seleksi akhir, diperoleh 24 artikel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Frekuensi Distribusi Artikel

Grafik 2 di bawah ini menunjukkan frekuensi distribusi artikel laporan keberlanjutan sektor publik selama periode tahun 2014-2025. Pada tahun 2024, terdapat 5 publikasi seiring dengan berkembangnya standar pelaporan berkelanjutan oleh IFRS (Aladwan, 2024; Jasni & Kamarudin, 2024; Kindratska, 2024; Reddy & Rajeswari, 2024; Rusu et al., 2024). Pada tahun berikutnya, jumlah artikel mengalami peningkatan menjadi 6 dengan berkembangnya isu pelaporan berkelanjutan pada sektor publik (Başar & Selİmoğlu, 2025; Calazans et al., 2025; Galip & Gönen, 2025; Johnston, 2025; Masoud, 2025; Özçelik et al., 2025).

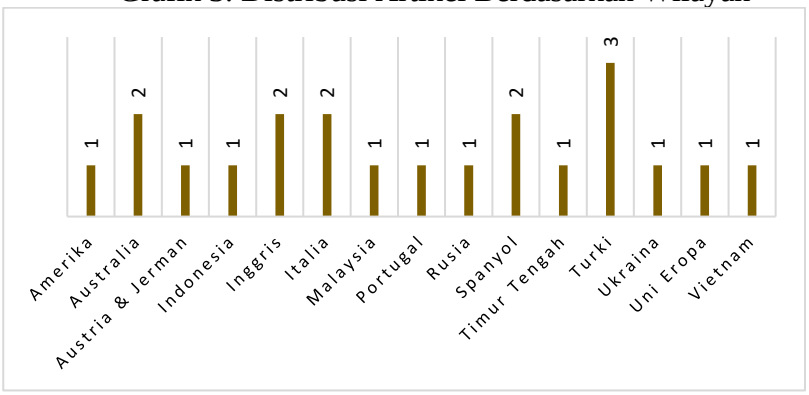
Grafik 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun



Sumber: Penulis, diolah

Dari seluruh artikel yang dikaji, sebagian besar merupakan studi yang hanya melibatkan satu negara sesuai yang ditampilkan pada Grafik 3 berikut. Penelitian mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan sektor publik paling banyak dibahas di Turki (Başar & Selİmoğlu, 2025; Galip & Gönen, 2025; Özçelik et al., 2025), disusul oleh negara-negara di Eropa (Alcaraz-Quiles et al., 2014; Domingues et al., 2017; Giacomini et al., 2018; Johnston, 2025; Montesinos & Brusca, 2019; Osobajo et al., 2022) dan Australia (Adams et al., 2014; Kaur & Lodhia, 2019). Sementara itu, belum banyak studi yang membahas pelaporan berkelanjutan sektor publik di negara Asia termasuk Indonesia.

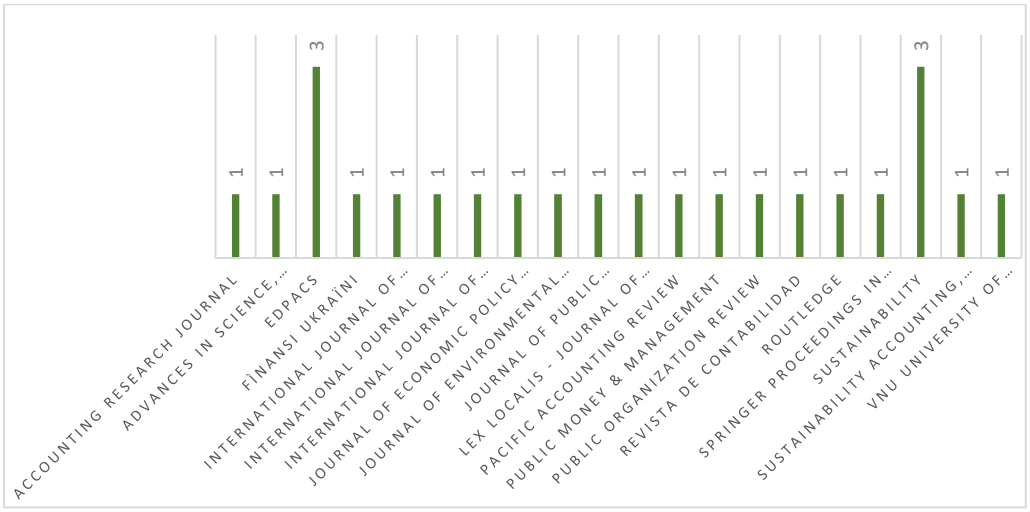
Grafik 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Wilayah



Sumber: Penulis, diolah

Distribusi artikel berdasarkan jurnal ditampilkan pada Grafik 4 di bawah ini. Sebaran publikasi yang relatif merata menunjukkan adanya perkembangan jumlah artikel dengan topik serupa yang diterbitkan oleh berbagai jurnal. Hal ini mengindikasikan bahwa pembahasan mengenai laporan keberlanjutan sektor publik tidak hanya terbatas pada jurnal yang berfokus pada akuntansi keberlanjutan, tetapi juga muncul di berbagai jurnal lainnya.

Grafik 4. Distribusi Artikel Berdasarkan Jurnal



Sumber: Penulis, diolah

Urgensi Pemerintah dalam Pelaporan Berkelanjutan Sektor Publik

Dibandingkan dengan sektor swasta, tingkat kematangan pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tergolong rendah (Başar & Selİmoğlu, 2025; Özçelik et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh sejumlah tantangan antara lain beban kerja administratif yang berat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelaporan non-keuangan, serta belum terstandarnya

praktik pelaporan yang sering kali bersifat terpisah-pisah dan tidak terintegrasi (Özçelik et al., 2025). International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), yang bertanggung jawab atas penyusunan standar sektor publik, mengembangkan standar berdasarkan kerangka kerja khusus organisasi sektor publik. Berdasarkan CIPFA (2024), dalam pengantar kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan entitas sektor publik, IPSASB mengidentifikasi enam karakteristik utama sektor publik yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu tingginya volume dan pentingnya transaksi non-pertukaran, dominasi anggaran sebagai alat utama akuntabilitas, sifat program publik yang jangka panjang, karakteristik khusus aset dan kewajiban, fungsi regulatif entitas publik, serta keterkaitannya dengan pelaporan statistik. Walaupun karakteristik tersebut dapat memengaruhi perumusan standar, IPSASB memastikan konsistensi perlakuan akuntansi atas transaksi yang serupa baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Oleh karena itu, dalam banyak hal, standar IPSAS yang berlaku di sektor publik tetap dijaga agar selaras dengan standar pelaporan keuangan sektor swasta yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) (CIPFA, 2024). Lebih lanjut, urgensi pemerintah dalam melakukan pelaporan berkelanjutan sektor publik antara lain sebagai berikut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan keberlanjutan dalam sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (Domingues et al., 2017; Giacomini et al., 2018; Özçelik et al., 2025). Laporan keberlanjutan memungkinkan penyampaian informasi yang transparan mengenai konsekuensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari berbagai aktivitas entitas sektor publik. Penyajian informasi ini menjadi elemen krusial dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, serta memastikan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap para pemangku kepentingan (Montesinos & Brusca, 2019; Rusu et al., 2024).

Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan

Menurut Özçelik et al. (2025), sebagai entitas yang memikul tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, organisasi sektor publik memiliki peran sentral dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang. Melalui pelaporan keberlanjutan, institusi publik dapat memantau secara sistematis pemanfaatan sumber daya alam serta mengelola penggunaannya secara bertanggung jawab untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan.

Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi

Pelaporan keberlanjutan dapat mendorong perubahan organisasi dan peningkatan kinerja dengan mengidentifikasi area yang lemah serta peluang untuk pengelolaan sumber daya yang lebih baik (Murphy & Janus, 2015). Hal ini karena laporan keberlanjutan dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis informasi dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik keberlanjutan (Özçelik et al., 2025). Dalam aspek ekonomi, pelaporan keberlanjutan berperan penting dalam menampilkan kondisi keberlanjutan fiskal serta membuka akses terhadap berbagai sumber pendanaan (Calazans et al., 2025; Özçelik et al., 2025). Kedua aspek ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi organisasi sektor publik, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran jangka panjang dan kepercayaan investor atau pemangku kepentingan eksternal. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara memegang peranan dalam mendorong pelaporan keberlanjutan sektor publik, terutama dalam konteks keberlanjutan fiskal, transparansi pengelolaan anggaran, dan akses terhadap pembiayaan hijau dan berkelanjutan.

Pengambilan keputusan berbasis keberlanjutan

Saat ini berkembang tren integratif yang mengarahkan pelaporan keberlanjutan untuk tidak hanya menjadi alat pelaporan semata, tetapi juga menjadi bagian yang menyatu dengan kerangka kebijakan publik dan tata kelola organisasi (Handoko & Lindawati, 2020). Pendekatan ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis data serta penerapan praktik pengadaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi kelembagaan (Jasni & Kamarudin, 2024). Kualitas pengambilan keputusan diwujudkan dengan menyediakan data yang andal yang dapat digunakan pimpinan/direksi untuk membuat keputusan yang tepat, utamanya karena didukung aspek integrasi informasi keberlanjutan ke dalam pelaporan keuangan (Aladwan, 2024).

Kendati urgensinya semakin diakui dalam tata kelola pemerintahan modern, praktik pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih belum menunjukkan tingkat kematangan dan konsistensi yang sebanding dengan praktik yang telah berkembang di sektor swasta. Per tahun 2024, hanya Badan Pemeriksa Keuangan RI yang telah menyusun laporan keberlanjutan, yaitu pada periode tahun 2020 dan 2023. Meskipun telah dibahas pada beberapa lembaga lain seperti OJK, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, serta BPDLH terkait isu keberlanjutan tetapi praktik penyusunan laporan keberlanjutan di Indonesia masih perlu didorong dan diimplementasikan secara bertahap.

Peluang dan Tantangan Penerapan SRS ED1 di Indonesia

Pelaporan keberlanjutan di sektor publik menjadi semakin penting dalam rangka mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan publik

terkait isu perubahan iklim. Salah satu inisiatif utama dalam pengembangan pelaporan keberlanjutan sektor publik global adalah penyusunan Exposure Draft IPSASB SRS ED 1 oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). SRS ED 1 muncul sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan akan kerangka pelaporan internasional yang mampu menjembatani hubungan antara dampak keuangan, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan publik (IPSASB, 2025).

Peluang Penerapan SRS ED1 di Indonesia

Isi utama dari SRS ED 1 mencakup pengungkapan dua jenis informasi penting yaitu risiko dan peluang iklim terhadap kegiatan operasional entitas sektor publik serta program kebijakan publik terkait iklim dan hasil yang dicapainya. Pengungkapan ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaporan keuangan lintas yurisdiksi guna meningkatkan keterbandingan dan transparansi (Kršeková, 2017). Hal ini penting untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, yaitu menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mendukung pengambilan keputusan (Masoud, 2025; Polzer et al., 2022). Pengungkapan aspek keberlanjutan menunjukkan bahwa sektor publik tidak hanya terkena dampak langsung dari krisis iklim dalam operasi sehari-hari, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mengatur kebijakan yang memengaruhi perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan sektor publik harus menggambarkan baik kondisi internal lembaga maupun efek dari intervensi kebijakan eksternal (IPSASB, 2025).

SRS ED 1 mengadopsi kerangka pelaporan dari sektor privat seperti Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), IFRS S2: *Climate-related Disclosures,* dan Global Reporting Initiative (GRI), namun menyesuaikannya dengan karakteristik sektor publik. Adaptasi ini memungkinkan pemerintah untuk tetap terhubung dengan harapan pasar modal global terkait transparansi iklim, tanpa kehilangan kekhasan mandat pelayanan publik yang diembannya (Masoud, 2025). Pendekatan ini juga membantu penyederhanaan pelaporan lintas sektor serta meningkatkan keterbandingan dan keterverifikasian informasi (Polzer et al., 2022).

Untuk mendukung implementasi yang efektif, IPSASB menyusun struktur pelaporan berbasis empat pilar yaitu *Governance*, Strategy, *Risk Management, Metrics and Targets*. Penerapan pilar ini diharapkan memberikan struktur pelaporan yang komprehensif dan sistematis (IPSASB, 2025). Lebih lanjut, SRS ED 1 menekankan pentingnya penyajian wajar (*fair presentation*), penyajian informasi yang terhubung (*connected information*), serta prinsip materialitas yang menyesuaikan konteks sektor publik. Informasi yang diungkap harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material, serta mampu menggambarkan hubungan antara informasi keuangan dan non-

keuangan dalam satu kesatuan laporan. Selain itu, entitas publik wajib mengungkap informasi yang relevan bagi pengguna utama laporan keuangan, yakni penyedia sumber daya dan penerima layanan, terutama jika informasi tersebut berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik.

Dalam upaya memperkuat fondasi konseptualnya, SRS ED 1 merujuk pada IPSASB Conceptual Framework, serta dokumen panduan lain seperti Recommended Practice Guidelines (RPG) No. 1 dan No. 3. Proses penyusunan standar ini juga diperkuat dengan pembentukan kelompok ahli seperti *Sustainability Reference Group* dan *Climate Topic Working Group*, yang memberikan masukan teknis dan akademik agar standar yang disusun responsif terhadap tantangan global. Dengan memperhatikan konteks sektor publik yang luas dan perannya dalam mendesain serta mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim, maka pelaporan keberlanjutan berdasarkan SRS ED 1 menjadi alat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, pengambilan keputusan berbasis data, dan partisipasi publik. Kehadiran standar ini bukan hanya untuk menyesuaikan sektor publik dengan tuntutan transparansi iklim global, tetapi juga sebagai bagian dari komitmen kolektif untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dan ketahanan iklim jangka panjang.

Di Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan masih bersifat *voluntary* di sektor swasta, dengan dasar hukum POJK 51 tahun 2017. Sementara itu, di sektor publik, praktik pelaporan serupa belum menjadi kewajiban yang diatur secara eksplisit. Sebagai langkah awal dalam penerapan pelaporan sektor publik, pendekatan piloting penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik serta tantangan yang mungkin dihadapi sebelum implementasi secara menyeluruh. Piloting dapat dilakukan pada K/L yang memiliki program atau kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap isu-isu lingkungan dan iklim. Identifikasi K/L yang menjadi kandidat piloting dilakukan berdasarkan peran strategis mereka dalam mendukung kebijakan pembangunan hijau dan pencapaian target-target SDGs ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Kementerian/Lembaga Piloting sesuai Matriks SDGs

Kementerian/Lembaga	Relevansi	Sektor
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Memiliki mandat utama dalam perlindungan lingkungan, kehutanan, dan pengendalian perubahan iklim (A. K. Savitri & Yuliastuti, 2024).	Perubahan Iklim (SDG 13)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	Mengatur kebijakan energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan (Kementerian ESDM, 2019).	Energi Bersih dan Terjangkau (SDG 7)
Kementerian Perhubungan	Berperan dalam pengurangan emisi sektor transportasi dan pengembangan transportasi hijau (Fahky, 2021).	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (SDG 11)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bertanggung jawab atas infrastruktur yang ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam pembangunan (Kementerian PUPR, 2019).	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (SDG 11)
Kementerian Pertanian	Berkaitan dengan pengelolaan lahan, ketahanan pangan, dan praktik pertanian berkelanjutan (Bahari et al., 2025)	Produksi Berkelanjutan (SDG 12)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Menjaga ekosistem laut dan pesisir serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan (BPPSDM, 2024).	Ekosistem Lautan (SDG 14)
Kementerian Perindustrian	Mendorong implementasi industri hijau dan efisiensi energi di sektor manufaktur (P. I. Savitri, 2024).	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (SDG 9), Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (SDG 12)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menjalankan pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan dan tertinggal (Pemerintah Indonesia, 2017).	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), Berkurangnya Kesenjangan (SDG 10)
Kementerian Keuangan	Memiliki peran penting dalam penganggaran hijau (*green budgeting*) dan	Penanganan Perubahan Iklim (SDG 13),

	pengelolaan insentif fiskal terkait iklim (UNDP, 2021).	Kemitraan untuk Tujuan (SDG 17)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang mengarusutamakan isu iklim dan SDGs (Perpres No. 59/2017, 2017).	Seluruh sektor SDGs (Koordinasi lintas sektor)

Sumber: Penulis, diolah

Tantangan Penerapan SRS ED-1

Penerapan Standar Laporan Keberlanjutan pada sektor publik tentu dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, adanya standar baru pada pelaporan keberlanjutan di sektor publik membuat perbedaan kerangka standar serta perbedaan interpretasi atas konsep keberlanjutan (Başar & Selİmoğlu, 2025; Giacomini et al., 2018; Reddy & Rajeswari, 2024). Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan pelaporan antar entitas publik pemerintah. Di beberapa negara lain seperti Turki, praktik pelaporan masih bersifat terfragmentasi dan tidak terpadu, sehingga elemen keberlanjutan disajikan secara terpisah-pisah tanpa kejelasan struktur (Başar & Selİmoğlu, 2025).

Tantangan besar kedua atas pelaporan berkelanjutan di sektor publik adalah keterbatasan tenaga profesional yang kompeten serta beban kerja tinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Secara umum, sektor publik menghadapi tantangan besar dalam menarik dan mempertahankan tenaga profesional yang berkualifikasi, yang disebabkan oleh faktor struktural, keterbatasan anggaran, dan rendahnya insentif motivasional (Johnston, 2025). Tantangan ini dihadapkan dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dari sektor publik serta pelaporan yang lebih komprehensif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah (Greiling & Grüb, 2014; Uyar et al., 2022). Beberapa upaya melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi dan informasi tentu menimbulkan memerlukan biaya yang tidak sedikit. (Özçelik et al., 2025).

Faktor kesiapan sistem informasi dan teknologi menjadi tantangan ketiga dalam penerapan SRS ED di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam mewujudkan kualitas dan keandalan laporan keberlanjutan di sektor publik memerlukan pemanfaatan alat digital dan *audit assurance* secara optimal (Özçelik et al., 2025). Apabila sistem informasi yang digunakan masih belum efisien, dengan data keberlanjutan yang tersebar dan tidak terintegrasi, maka proses pengumpulan dan pelaporan informasi yang diwajibkan akan sulit dilakukan.

Terakhir, tantangan keempat adalah aspek materialitas dalam pelaporan keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa isu-isu yang diangkat sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dan hasil keberlanjutan (Giacomini et al., 2018). Pelaporan yang efektif juga harus melibatkan komunikasi dua arah, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah, agar kinerja yang dilaporkan mencerminkan dampak nyata dari aktivitas organisasi terhadap aspek keberlanjutan (Osobajo et al., 2022). Di sisi lain, pelaporan keberlanjutan dihadapkan pada tantangan sektoral, khususnya pada pemerintah daerah yang secara sukarela terlibat dalam pelaporan namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan dinamika organisasi (Giacomini et al., 2018). Bahkan di tingkat Uni Eropa, hanya sebagian kecil institusi yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan, menunjukkan bahwa praktik pelaporan masih belum menjadi standar yang diikuti secara menyeluruh (Bryan, 2022).

PENUTUP

Pelaporan keberlanjutan sektor publik di Indonesia menunjukkan urgensi yang kian meningkat seiring dengan tuntutan transparansi, efisiensi fiskal, dan integrasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara. Meskipun berbagai kebijakan seperti penganggaran hijau dan RPJMN berbasis SDGs telah diarusutamakan, pelaporan keberlanjutan secara sistematis dan terstandar di lingkungan entitas pemerintah masih terbatas. Tantangan utama yang dihadapi meliputi belum adanya standar wajib yang mengikat, rendahnya kesiapan sumber daya manusia dan teknologi, serta belum adanya praktik pelaporan yang terintegrasi antara informasi keuangan dan non-keuangan.

Hadirnya Sustainability Reporting Standard Exposure Draft 1 (SRS ED-1) menjadi terobosan penting dalam membangun fondasi pelaporan keberlanjutan sektor publik secara global, termasuk Indonesia. Standar ini memuat pilar-pilar strategis yang meliputi tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target, yang sejalan dengan praktik terbaik di sektor swasta, namun disesuaikan dengan mandat pelayanan publik. Adopsi SRS ED-1 di Indonesia berpotensi meningkatkan akuntabilitas, memperkuat legitimasi kebijakan, serta memperluas akses pada pembiayaan iklim. Namun demikian, penerapannya dihadapkan pada tantangan struktural seperti fragmentasi sistem informasi, resistensi budaya organisasi, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan antar level pemerintahan. Perlu juga ditelaah lebih dalam integrasi antara laporan keberlanjutan dan sistem akuntabilitas nasional agar praktik ini tidak menjadi pelaporan simbolik semata.

Saat ini, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat adopsi pelaporan keberlanjutan sektor publik dengan

menetapkan kerangka regulatif nasional yang mengacu pada SRS ED-1. Langkah awal dapat dimulai melalui *pilot project* pada K/L yang memiliki relevansi kuat dengan isu iklim dan SDGs, guna mengidentifikasi tantangan implementasi dan model pelaporan terbaik. Selain itu, pemerintah harus berinvestasi pada peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur digital, serta membangun sistem integrasi pelaporan antar lembaga yang berbasis pada interoperabilitas data. Regulasi sebaiknya didukung dengan insentif kebijakan, seperti penghargaan keberlanjutan atau preferensi pembiayaan untuk entitas pelapor aktif. Lebih lanjut, integrasi pelaporan keberlanjutan ke dalam siklus perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan (misalnya RPJMN) akan memastikan bahwa laporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga alat strategis dalam perumusan kebijakan publik. Terakhir, dibutuhkan mekanisme audit dan reviu independen serta pelibatan publik secara inklusif untuk memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan bersifat akuntabel, relevan, dan mampu mendorong transformasi menuju pemerintahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap krisis iklim.

Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pelaporan keberlanjutan sektor publik di Indonesia. Dengan mengacu pada SRS ED-1, pemerintah dapat membangun sistem pelaporan yang terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan standar internasional. Implikasi akademiknya terletak pada kontribusi terhadap literatur pelaporan sektor publik di negara berkembang, serta penyediaan kerangka awal bagi penelitian lanjutan di bidang tata kelola keberlanjutan. Namun, kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya berbasis studi literatur tanpa data empiris lapangan. Selain itu, belum dianalisis secara mendalam faktor kelembagaan dan kesiapan teknis K/L. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* guna mengevaluasi implementasi riil, tantangan struktural, serta efektivitas SRS ED-1 dalam konteks Indonesia.

REFERENSI

Adams, C. A., Muir, S., & Hoque, Z. (2014). Measurement of sustainability performance in the public sector. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *5*(1), 46–67. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-04-2012-0018.

Aladwan, M. (2024). Sustainable accounting information and enhancement of quality for financial decision making. *International Journal of Productivity and Quality Management*, *43*(4), 440–458. https://doi.org/10.1504/IJPQM.2024.143224.

Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2014). A Comparative Analysis of Transparency in Sustainability Reporting by

Local and Regional Governments. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *12*(1), 55–78. https://doi.org/10.4335/12.1.55-78(2014).

Al-Shaer, H., Albitar, K., & Hussainey, K. (2022). Creating Sustainability Reports That Matter: An Investigation Of Factors Behind The Narratives. *Journal of Applied Accounting Research*, *23*(3), 738–763. https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2021-0136.

Bahari, D. I., Lubis, M. M., Apriyanti, E., Affandi, M. R., & Perlambang, R. (2025). Analisis Pengaruh Pertanian Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan di Daerah Perdesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*.

Başar, A. B., & Selİmoğlu, S. (2025). A Sustainability Road Map For The Public Sector: Turkiye Case. *EDPACS*, 1–21. https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2500802

BEI. (2025). *What is ESG?* Https://Esg.Idx.Co.Id/What-Is-Esg.

BPPSDM. (2024). *KKP Tekankan Pentingnya Kolaborasi Capai SDG 14*. Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan.

Bryan, K. (2022). Sustainability reporting at EU level: leading by example? *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *34*(3), 488–497. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-05-2021-0083.

Calazans, N., Marques, T., Eugénio, T., & Gomes, J. F. S. (2025). Sustainability Report of Portuguese Municipalities: The Three Pillars of Sustainable Development. *Public Organization Review*, *25*(1), 169–191. https://doi.org/10.1007/s11115-024-00782-0.

CIPFA. (2024). *Sustainability reporting: Is the public sector different to the private sector?* Https://Www.Cipfa.Org/Cipfa-Thinks/Insight/Is-the-Public-Sector-Different-to-the-Private.

Domingues, A. R., Lozano, R., Ceulemans, K., & Ramos, T. B. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. *Journal of Environmental Management*, *192*, 292–301. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.01.074.

Fahky, A. R. (2021). *Kemenhub berkomitmen terapkan logistik hijau*. ANTARA.

Galip, Y., & Gönen, S. (2025). Examination of sustainability disclosures of public sector institutions in Türkİye within the scope of public sector sustainability reporting standards. *EDPACS*, *70*(7), 124–142. https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2500213.

Giacomini, D., Rocca, L., Carini, C., & Mazzoleni, M. (2018). Overcoming the Barriers to the Diffusion of Sustainability Reporting in Italian LGOs: Better Stick or Carrot? *Sustainability*, *10*(1), 131. https://doi.org/10.3390/su10010131.

Greiling, D., & Grüb, B. (2014). Sustainability reporting in Austrian and German local public enterprises. *Journal of Economic Policy Reform*, *17*(3), 209–223. https://doi.org/10.1080/17487870.2014.909315.

Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., & McGuinness, L. A. (2022). An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, *18*(2). https://doi.org/10.1002/cl2.1230.

Handoko, B. L., & Lindawati, A. S. L. (2020). The Importance of Sustainability Audit Report in Go Public Companies Sector, in Indonesia. *Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal*, *5*(4), 217–222. https://doi.org/10.25046/aj050427.

Hidayati, I. (2023). Sustainability Reporting in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Jurnal GeoEkonomi*, *14*(2), 213–246. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i2.319.

International Public Sector Accounting Standards Board. (2024). *Advancing Public Sector Sustainability Reporting*. International Public Sector Accounting Standards Board.

IPSASB. (2025). *Climate-related Disclosures Exposure Draft 1*.

Jasni, N. S., & Kamarudin, S. N. (2024). Trends and Insights in Sustainability Accounting in the Public Sector: Unveiling the Research Landscape. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *14*(4), 163–171. https://doi.org/10.32479/ijefi.16547.

Johnston, K. (2025). New development: Is it time for New Public Service Bargain? *Public Money & Management*, *45*(2), 167–169. https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2343168.

Jørgensen, S., Mjøs, A., & Pedersen, L. J. T. (2022). Sustainability reporting and approaches to materiality: tensions and potential resolutions. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, *13*(2), 341–361. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2021-0009.

Kaur, A., & Lodhia, S. K. (2019). Key Issues And Challenges In Stakeholder Engagement In Sustainability Reporting. *Pacific Accounting Review*, *31*(1), 2–18. https://doi.org/10.1108/PAR-11-2017-0092.

Kementerian ESDM. (2019). *Dirjen EBTKE: Program Energi Berkeadilan Sejalan dengan Upaya Pencapaian SDG 7*. Kementerian ESDM.

Kementerian PUPR. (2019). *Kementerian PUPR Dorong Pembangunan Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan*. Kementerian PUPR.

Kindratska, L. (2024). Sustainability reporting by public sector entities. *Fìnansi Ukraïni*, *2024*(6), 108–121. https://doi.org/10.33763/finukr2024.06.108.

Kršeková, M. (2017). *Disclosure of Financial Information About the General Government Sector by IPSAS* (pp. 485–495). https://doi.org/10.1007/978-3-319-49559-0_45

Kumaradewi, K. A., & Halim, A. (2019). Kajian Atas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat Indonesia Tahun 2015 - 2017. *Accounting and Business Information System Journal*.

Limanseto, H. (2022). *Bangun Ekonomi Berkelanjutan, G20 Terus Kembangkan Blue, Green, dan Circular Economy*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Limarwati, D., Alfiyani, Y. S. R., & Firmansyah, A. (2024). Laporan Keberlanjutan: Manfaat Dan Perkembangan Standar. *Jurnalku*.

Masoud, N. (2025). Global insights on public sector accounting reforms: a comprehensive study on the adoption, implementation, and impact of IFRS and IPSAS. *Accounting Research Journal*, *38*(1), 80–105. https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2024-0228.

Montesinos, V., & Brusca, I. (2019). Non-financial reporting in the public sector: alternatives, trends and opportunities. *Revista de Contabilidad*, *22*(2), 122–128. https://doi.org/10.6018/rcsar.383071.

Munoz, E., Zhao, L., & Yang, D. C. (2017). Issues in Sustainability Accounting Reporting. *Accounting and Finance Research*, *6*(3), 64. https://doi.org/10.5430/afr.v6n3p64.

Murphy, H., & Janus, B. (2015, March 16). Managing HSE Performance Through Sustainability Reporting. *SPE E&P Health, Safety, Security and Environmental Conference-Americas*. https://doi.org/10.2118/173522-MS.

Osobajo, O. A., Oke, A., Lawani, A., Omotayo, T. S., Ndubuka-McCallum, N., & Obi, L. (2022). Providing a Roadmap for Future Research Agenda: A Bibliometric Literature Review of Sustainability Performance Reporting (SPR). *Sustainability*, *14*(14), 8523. https://doi.org/10.3390/su14148523.

Özçelik, M., Deran, A., & Veli Alici, O. (2025). Internal auditors' views on the importance of sustainability reporting in public sector organizations, reporting process and auditing. *EDPACS*, 1–33. https://doi.org/10.1080/07366981.2025.2500200.

Pemerintah Indonesia. (2017). *Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*. Sustainable Development.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*.

Polzer, T., Grossi, G., & Reichard, C. (2022). Implementation of the international public sector accounting standards in Europe. Variations on

a global theme. *Accounting Forum*, *46*(1), 57–82. https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1920277

Puspasari, R. (2022). *Siaran Pers: Aksi Bersama Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan bagi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kementerian Keuangan.

Rahmasari, P. S., & Bandiyono, A. (2025). Optimalisasi Pelaporan Keberlanjutan di Sektor Publik Indonesia: Strategi Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*.

Reddy, N. S., & Rajeswari, K. (2024). Evolving Landscape of Sustainability Reporting: A Comprehensive Review. In *Diversity, Equity And Inclusion* (pp. 507–519). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003487180-39

Ritchie, H. (2024). *Climate Change Will Affect Food Production, But Here Are The Things We Can Do To Adapt*. Our World in Data.

Rusu, T. M., Odagiu, A., Pop, H., & Paulette, L. (2024). Sustainability Performance Reporting. *Sustainability*, *16*(19), 8538. https://doi.org/10.3390/su16198538.

Saraswati, E., & Alam, D. (2024). *Laporan Berkelanjutan: Konsep Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Vol. I*. Rajawali Pers.

Savitri, A. K., & Yuliastuti, N. (2024). Mitigasi Perubahan Iklim melalui Upaya Pengelolaan Sampah di Dusun Soka, Kabupaten Semarang. *Teknik PWK*.

Savitri, P. I. (2024). *Kemenperin: Standard Industri Hijau untuk pembangunan berkelanjutan*. ANTARA.

Sitorus, L. M., & Febrianto, S. (2024). The Dynamics of Implementing Sustainability Accounting Standards in Improving Financial Transparency and Accountability. *GEOFORUM*, 119–129. https://doi.org/10.30598/geoforumvol3iss2pp119-129.

UNDP. (2021). *Strengthening Indonesia's Climate Finance Governance through Climate Budget Tagging and Green Sukuk Issuance*. UNDP.

Uyar, A., Karmani, M., Kuzey, C., Kilic, M., & Yaacoub, C. (2022). Does Governance Quality Explain the Sustainability Reporting Tendency of the Public Sector? Worldwide Evidence. *International Journal of Public Administration*, *45*(13), 931–947. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1900243.

Wachira, M. M., & Mathuva, D. M. (2022). *Corporate Environmental Reporting in Sub-Saharan Africa: A Literature Review and Suggestions for Further Research* (pp. 159–182). https://doi.org/10.1108/S1479-359820220000010008.

Zhang, L. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance (ESG) on Corporate Value Enhancement. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, *24*, 792–797. https://doi.org/10.54097/4mvdkn40.

Zhao, W. (2024). Research Trend in the Development of Environmental, Social, and Governance (ESG). *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, *122*(1), 183–194. https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.17815.

Lampiran

No	Judul	Penulis	Tahun	Jurnal	Wilayah	Jenis	Substansi
1	A Comparative Analysis of Transparency in Sustainability Reporting by Local and Regional Governments	Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D.	2014	Lex Localis - Journal of Local Self-Government	Spanyol	*Journal Article*	Studi ini menganalisis praktik penyebaran informasi keberlanjutan oleh pemerintah daerah besar di Spanyol dan menemukan bahwa tingkat pelaporannya hanya sekitar 50%, lebih rendah dibanding pemerintah regional. Informasi sosial merupakan yang paling banyak diungkapkan, sementara informasi lingkungan menjadi yang paling minim dilaporkan.
2	A Sustainability Road Map For The Public Sector: Turkiye Case	Başar, A. B., & Selİmoğlu, S.	2025	EDPACS	Turki	*Journal Article*	Jurnal ini mengkaji perkembangan regulasi internasional terkait pelaporan keberlanjutan sektor publik dan membandingkannya dengan praktik di Turki yang masih terfragmentasi. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam standar dan implementasi, serta menawarkan rekomendasi untuk membangun kerangka hukum dan strategi pelaporan keberlanjutan yang lebih terstandarisasi.
3	Disclosure of Financial Information About the General Government Sector by IPSAS	Kršeková, M.	2017	Springer Proceedings in Business and Economics	Rusia	*Book Section*	Membahas pentingnya penerapan IPSAS untuk meningkatkan konsistensi, transparansi, dan *comparability* pelaporan keuangan sektor publik, khususnya terkait pengungkapan informasi keuangan *general government sector* dalam laporan keuangan konsolidasian
4	Does Governance Quality Explain the Sustainability Reporting Tendency of the Public Sector? Worldwide Evidence	Uyar, A., Karmani, M., Kuzey, C., Kilic, M., & Yaacoub, C.	2022	International Journal of Public Administration	-	*Journal Article*	Studi ini menemukan bahwa kualitas tata kelola publik, yang diukur melalui indikator WGI, berhubungan signifikan dengan kecenderungan pelaporan keberlanjutan sektor publik di 242 negara. Lima dari enam WGI terbukti memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat pelaporan, menunjukkan keterkaitan erat antara kinerja *governance* dan praktik *sustainability disclosure* pemerintah.

5	Evolving Landscape of Sustainability Reporting: A Comprehensive Review	Reddy, N. S., & Rajeswari, K.	2024	Routledge	-	*Book Section*	Artikel ini menyoroti ketidakkonsistenan standar dan definisi dalam *sustainability reporting*, yang menyebabkan variasi kualitas, kesulitan komparasi, serta ketidakakuratan dalam mencerminkan kinerja keberlanjutan. Studi ini menekankan perlunya standardisasi, kerangka berbasis hasil, dan harmonisasi internasional untuk meningkatkan kegunaan laporan bagi pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
6	Examination of sustainability disclosures of public sector institutions in Türkİye within the scope of public sector sustainability reporting standards	Galip, Y., & Gönen, S.	2025	EDPACS	Turki	*Journal Article*	Jurnal ini memetakan kerangka pelaporan keberlanjutan bagi institusi publik di Turki serta menganalisis praktik pengungkapannya pada universitas, kementerian, dan pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan variasi signifikan dalam jenis dan dasar kriteria pelaporan, sekaligus menekankan perlunya standar pelaporan keberlanjutan yang selaras dengan standar internasional.
7	Global insights on public sector accounting reforms: a comprehensive study on the adoption, implementation, and impact of IFRS and IPSAS	Masoud, N.	2025	Accounting Research Journal	Amerika	*Journal Article*	Studi ini menganalisis adopsi IFRS dan IPSAS di 173 yurisdiksi (2000–2022) dan menemukan bahwa standar internasional tersebut meningkatkan transparansi, akuntabilitas publik, serta kinerja ekonomi, termasuk FDI dan peringkat kredit. Dampak terbesar muncul pada negara dengan institusi kuat, sementara negara berkembang tetap memperoleh manfaat berupa tata kelola lebih baik dan penurunan korupsi.
8	Internal auditors' views on the importance of sustainability reporting in public sector organizations, reporting process and auditing	Özçelik, M., Deran, A., & Veli Alici, O.	2025	EDPACS	Turki	*Journal Article*	Jurnal ini menilai pentingnya pelaporan keberlanjutan di sektor publik dari perspektif auditor internal, menyoroti aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai fokus utama. Studi ini menemukan bahwa tantangan terbesar adalah beban kerja dan kurangnya SDM kompeten, sementara kebutuhan akan audit *assurance* serta dukungan teknologi dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas pelaporan

9	Key Issues And Challenges In Stakeholder Engagement In Sustainability Reporting	Kaur, A., & Lodhia, S. K.	2019	Pacific Accounting Review	Australia	*Journal Article*	Studi ini mengkaji tiga pemerintah lokal Australia dan menemukan bahwa proses *stakeholder engagement* dalam pelaporan keberlanjutan kerap terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya komitmen internal, faktor politik, serta keragaman kepentingan. Temuan memberikan panduan praktis bagi otoritas publik untuk memperbaiki kualitas keterlibatan pemangku kepentingan agar pelaporan keberlanjutan lebih efektif dan akuntabel.
10	Measurement of sustainability performance in the public sector	Adams, C. A., Muir, S., & Hoque, Z.	2014	Sustainability Accounting, Management and Policy Journal	Australia	*Journal Article*	Artikel ini meninjau praktik pengukuran kinerja di lembaga pemerintah Australia dan menemukan bahwa ukuran kinerja terkait keberlanjutan masih sangat minim digunakan, jauh di bawah ukuran efisiensi biaya dan kualitas. Studi ini menyimpulkan bahwa adopsi ukuran kinerja keberlanjutan tidak akan signifikan tanpa kewajiban pelaporan atau mekanisme kompetisi berbasis kinerja dalam sektor publik.
11	New development: Is it time for New Public Service Bargain?	Johnston, K.	2025	Public Money & Management	Inggris	*Journal Article*	Artikel ini menyoroti menurunnya daya tarik sektor publik sebagai tempat bekerja akibat reformasi neoliberal, rendahnya remunerasi, dan tingginya tuntutan akuntabilitas. Penulis mengusulkan *New Public Service Bargain* berbasis pendekatan *human relations* untuk menarik dan mempertahankan talenta serta memperkuat kapasitas negara dalam memberikan layanan publik.
12	Non-financial reporting in the public sector: alternatives, trends and opportunities	Montesinos, V., & Brusca, I.	2019	Revista de Contabilidad	Spanyol	*Journal Article*	Artikel ini meninjau berbagai model informasi non-keuangan seperti *sustainability reporting, integrated reporting,* dan *popular reporting* yang digunakan sektor publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Studi menekankan bahwa model-model ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan melengkapi laporan keuangan tradisional.

13	Overcoming the Barriers to the Diffusion of Sustainability Reporting in Italian LGOs: Better Stick or Carrot?	Giacomini, D., Rocca, L., Carini, C., & Mazzoleni, M.	2018	Sustainability	Italia	*Journal Article*	Studi ini menemukan bahwa pelaporan keberlanjutan di pemerintah daerah Italia mengalami penurunan karena hambatan seperti biaya, sifat sukarela, dan efektivitas laporan yang rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa *sustainability report* cenderung menjadi tren deskriptif tanpa dampak signifikan, sehingga mendorong perlunya kewajiban pelaporan agar adopsinya meningkat.
14	Providing a Roadmap for Future Research Agenda: A Bibliometric Literature Review of Sustainability Performance Reporting (SPR)	Osobajo, O. A., Oke, A., Lawani, A., Omotayo, T. S., Ndubuka-McCallum, N., & Obi, L.	2022	Sustainability	Inggris	*Journal Article*	Studi ini menilai perkembangan riset terkait *sustainability performance reporting* melalui *bibliometric review* dan menemukan kekeliruan antara konsep keberlanjutan dan CSR dalam praktik pelaporan. Temuan utama menunjukkan bahwa organisasi lebih fokus pada pelaporan dibanding komunikasi dua arah, sehingga kinerja yang dilaporkan belum mencerminkan dampak keberlanjutan yang sesungguhnya.
15	Sustainability Performance Reporting	Rusu, T. M., Odagiu, A., Pop, H., & Paulette, L.	2024	Sustainability	-	*Journal Article*	Studi ini menganalisis praktik *sustainability reporting* dan ESG *reporting*, termasuk standar internasional seperti GRI, IIRC, SASB, TCFD, dan ISO, untuk menilai efektivitas pengukuran serta pelaporan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi. Temuan menunjukkan perlunya peningkatan relevansi dan konsistensi laporan agar lebih mendukung pengambilan keputusan, transparansi, dan penerapan strategi bisnis berkelanjutan.
16	Sustainability Report of Portuguese Municipalities: The Three Pillars of Sustainable Development	Calazans, N., Marques, T., Eugénio, T., & Gomes, J. F. S.	2025	Public Organization Review	Portugal	*Journal Article*	Studi ini mengkaji pelaporan keberlanjutan 308 pemerintah kota di Portugal dan menemukan bahwa hanya 28 yang menerbitkan laporan keberlanjutan, dengan fokus utama pada informasi lingkungan dan ekonomi. Penelitian juga menunjukkan minimnya pengungkapan aspek sosial serta rendahnya keselarasan dengan SDGs.

17	Sustainability reporting at EU level: leading by example?	Bryan, K.	2022	Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management	Uni Eropa	*Journal Article*	Artikel ini menilai praktik pelaporan keberlanjutan di lembaga dan agen Uni Eropa dan menemukan bahwa hanya 2 dari 53 entitas yang menerbitkan laporan keberlanjutan, sehingga UE belum mampu menjadi teladan dalam area ini. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan utama pengembangan pelaporan keberlanjutan di sektor publik supranasional dan menyorot kebutuhan riset lanjutan.
18	Sustainability reporting by public sector entities	Kindratska, L.	2024	Fìnansi Ukraïni	Ukraina	*Journal Article*	Artikel ini menganalisis pembentukan informasi non-keuangan dan penyusunan laporan keberlanjutan di entitas sektor publik, terutama dalam konteks krisis dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas. Studi ini menekankan peran inovatif akuntan serta perlunya standardisasi dan penguatan sistem akuntansi untuk menghasilkan pelaporan keberlanjutan yang andal.
19	Sustainability reporting in Austrian and German local public enterprises	Greiling, D., & Grüb, B.	2014	Journal of Economic Policy Reform	Austria & Jerman	*Journal Article*	Artikel ini menelaah praktik pelaporan keberlanjutan pada BUMD/BUMN di Jerman dan Austria dan mengaitkannya dengan tuntutan akuntabilitas publik, melalui analisis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan 103 kota. Temuan menunjukkan bahwa praktik pelaporan masih beragam dan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi akuntabilitas yang lebih tinggi pada entitas publik.
20	Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability	Domingues, A. R., Lozano, R., Ceulemans, K., & Ramos, T. B.	2017	Journal of Environmental Management	Italia	*Journal Article*	Artikel ini menganalisis hubungan antara pelaporan keberlanjutan dan manajemen perubahan organisasi di sektor publik, berdasarkan survei terhadap PSO yang menggunakan pedoman GRI. Hasilnya menunjukkan bahwa meski masih tertinggal, pelaporan keberlanjutan mulai berfungsi sebagai alat komunikasi yang mendorong perubahan organisasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

21	Sustainable accounting information and enhancement of quality for financial decision making	Aladwan, M	2024	International Journal of Productivity and Quality Management	Timur Tengah	*Journal Article*	Studi ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen di perusahaan-perusahaan Timur Tengah. Penelitian merekomendasikan peningkatan investasi dalam pelaporan keberlanjutan serta penguatan regulasi untuk memastikan praktik pelaporan yang lebih komprehensif.
22	Sustainable Performance Measurement in Public Sectors - A Systematic Literature Review	Anh, V. T. Van.	2023	VNU University of Economics and Business	Vietnam	*Journal Article*	Artikel ini meninjau 22 studi (2017–2021) tentang bagaimana kinerja keberlanjutan diukur dan dilaporkan di sektor publik, menunjukkan bahwa GRI menjadi kerangka yang paling banyak diadopsi. Temuannya menegaskan bahwa riset dan praktik pelaporan keberlanjutan sektor publik masih tertinggal dibanding sektor privat, dan menawarkan wawasan untuk peningkatan kinerja organisasi publik.
23	The Importance of Sustainability Audit Report in Go Public Companies Sector, in Indonesia.	Handoko, B. L., & Lindawati, A. S. L.	2020	Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal	Indonesia	*Journal Article*	Studi ini menyoroti meningkatnya kebutuhan audit laporan keberlanjutan pada BUMN Indonesia seiring diwajibkannya pelaporan keberlanjutan, menunjukkan bahwa *assurance* dapat meningkatkan reputasi, nilai tambah, dan akuntabilitas perusahaan. Namun, penelitian juga mencatat kelemahan berupa kurangnya *comparability* dan tingginya biaya pelaksanaan audit keberlanjutan.
24	Trends and Insights in Sustainability Accounting in the Public Sector: Unveiling the Research Landscape	Jasni, N. S., & Kamarudin, S. N.	2024	International Journal of Economics and Financial Issues	Malaysia	*Journal Article*	Studi ini meninjau evolusi akuntansi keberlanjutan di sektor publik melalui analisis bibliometrik dan tematik, menunjukkan pergeseran menuju strategi berbasis teknologi, *data-driven policymaking*, dan penguatan tata kelola. Penelitian menekankan perlunya penyelarasan standar pelaporan keberlanjutan serta memperlihatkan tren meningkatnya perhatian pada pengadaan berkelanjutan dan perumusan kebijakan berbasis data.